

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh birokrasi. Didalam birokrasi pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya, agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawaban. (Rakhmat, 2018:136). Akuntabilitas memiliki prinsip utama yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban (Mardiasmo & Chirtianingrum,2018).

Setiap instansi pemerintah wajib menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kemudian, pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Nordawan dan Hertianti, 2010:167). Instansi pemerintah sudah seharusnya yakni menjalankan akuntabilitas kinerja dan menyajikan laporan ialah Pemerintah dari Pusat, Pemerintah dari Daerah Kabupaten/Kota. Moehiono (2012) menyatakan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Indonesia, telah diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan akan tindak lanjuti oleh 2 Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/2003.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi, baik itu pada organisasi privat atau swasta. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat dirahasiakan dalam organisasi privat, namun di dalam organisasi sektor public anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sering tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Perilaku para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif,

dan efisiensi kerja yang kemudian berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah.

Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua peraturan perundang-undangan tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggung jawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Selain dari pada itu, kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari

dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program/ kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Belawan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Mengingat semakin kompleks tugas Camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan

perekonomian ditingkat kecamatan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Renja harus mengacu pada dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja juga dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD. Pengukuran capaian kinerja dalam LAKIP Kecamatan Medan Belawan Tahun 2023, Dalam Dokumen Rencana Kinerja Kecamatan Medan Belawan Tahun Anggaran 2023 memuat informasi tentang Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), disajikan Bersama Indikator Kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai Strategi yang relevan dengan Sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang simetris dari Program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok Indikator Kinerja Kegiatan, yang meliputi masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefits*) dan dampak (*Impacs*) berikut rencana capaian (*Target*).

Berdasarkan pemaparan di atas, Kecamatan Medan Belawan masih belum dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik yang artinya akuntabilitas Kecamatan Medan Belawan masih rendah. Akibat dari kurang mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk

membayai program/ kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih dibawah target. Hal ini menunjukkan dalam perencanaan dan penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya ketidak seimbangan anggaran yang menyebabkan program/ kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Selanjutnya, terkait dengan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Heksi Kinasih (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo), menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hasil penelitian tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilianti, dkk (2020) dengan judul 5 penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan

Wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian dilaksanakan oleh Dana Rizky Anatasia di tahun (2018), yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), menyatakan bahwa secara parsial variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut tidak mendukung peneliti dilakukan oleh Muhammad Hafzhan (2021), dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Hasil dari peneliti menyatakan bahwa variabel sistem pelaporan itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin membahas masalah tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian : **Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pola penyerapan yang tidak merata ini mengakibatkan realisasi belanja mengalami penumpukan pada akhir tahun anggaran.
2. Rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian.
3. Sistem pelaporan yang dilakukan masih belum maksimal.
4. Masih banyak hal yang harus di perbaiki dari sistem pelaporan.
5. Menurunnya tingkat produktivitas
6. Terdapat indikator kinerja yang mengalami penurunan persentase.

1.3. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dalam pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.
2. Apakah Terdapat Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.
3. Apakah Terdapat Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pada Camat Medan Belawan.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bagian dari sumbangsih pemikiran peneliti untuk Universitas Islam Sumatera Utara dan sebagai bahan pembelajaran lanjutan bagi mahasiswa/peneliti selanjutnya.

2. Bagi Diri Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan serta wawasan penulis, terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Bagi Organisasi

Sebagai bahan dan sumber informasi untuk kemajuan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Perencanaan Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran atau penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget*, berasal dari bahasa Perancis "*bougette*" yang artinya tas kecil. Menurut Indra Bastian (2010:191), berdasarkan *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (*budget*) adalah "...rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Pengertian anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah sebagai berikut: "Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja".

Menurut Mardiasmo (2011:61) menjelaskan definisi anggaran sebagai berikut: “Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.1.2 Fungsi Perencanaan Anggaran

Robbin dan Coulter dalam Latif dkk (2014) mengatakan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Dalam sistem penganggaran, semua kegiatan berawal dari rencana pembangunan jangka menengah yang diakomodir dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Dalam RKPD akan dijabarkan prioritas pembangunan dan plafon dari anggaran dari masing- masing kegiatan/program pembangunan. Kemudian Prioritas kegiatan dijabarkan lebih rinci dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang menjadi input dalam menyusun RAPBD. RKA didokumentasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah

(RKA SKPD). Selanjutnya dari RAPBD dikemas lagi dalam APBD dan dijabarkan dalam kegiatan dan program pembangunan yang telah disusun dalam RKPD, tentu saja semua kegiatan dan program tersebut harus didukung dengan dana untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan dan program tersebut. Sebagai bagian dari proses sistem administrasi yang baik maka penjabaran APBD harus didokumentasikan dalam daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) (Fadila, 2009).

Perencanaan anggaran merupakan Subsistem perencanaan strategis (*strategic planning*), secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah (Latif dkk, 2014)

2.1.1.3 Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Anggraini (2010:103) Anggaran Berbasis Kinerja atau disingkat (ABK) merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional dengan tujuan semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. (Penjelasan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000, pasal 8).

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.
- b. Keluaran (*output*) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

- c. Masukan (*Input*) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
- d. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

Anggaran berbasis kinerja disusun berdasar pada hasil yang ingin dicapai, dari setiap dana yang dikeluarkan sesuai harapan masyarakat. Ini berbeda dengan sistem anggaran yang lama, dimana pemerintah hanya menekankan kemampuannya dalam menyerap anggaran tetapi kurang mampu memperhatikan pencapaian hasil yang diharapkan.

2.1.1.4 Indikator Perencanaan Anggaran

Indikator Perencanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam konteks penerapan anggaran berbasis kinerja ini, indikator kinerja dalam Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 3 level, yaitu:

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai tingkat keberhasilan Program.
- b) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai tingkat keberhasilan Kegiatan.
- c) Indikator Keluaran untuk menilai tingkat keberhasilan Subkegiatan.

2.1.2 Sistem Pelaporan

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Menurut Mardiasmo (2009:25) “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran *financial* dan *non financial*”. Pengertian Umum Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*Sytema*” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian- bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Sistem merupakan kumpulan elemen- elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem. Halim (2007:32) menjelaskan bahwa Laporan keuangan adalah: “Informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut”.

Sedangkan Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Menurut Ismaya (2005) pengertian pelaporan keuangan adalah : “Suatu laporan yang disertai segala implementasinya dengan melalui penyiapan neraca dan ikhtisar laba rugi”. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP: 2000) mengemukakan laporan yang baik adalah “Laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan”. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP), Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.1.2.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Ghozali, Imam da Arifin Sabeni (2001) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (*viability*) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (*publik relation*) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figures*) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Sedangkan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

2.1.2.3 Indikator Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Indikator sistem pelaporan dalam penelitian Nur Heni Safitri (2020), yaitu :

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus
4. Laporan keuangan dapat diuji
5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

2.1.2.4 Sitem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Handy Fauzan (2017) mengatakan bahwa ada jalinan yang positif atas sistem pelaporan dengan akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk (2019) bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semakin lancar penggunaan sistem pelaporan maka pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini mendukung agency theory bahwa pemerintah selaku agent sudah menjalankan kewajiban melaporkan laporan keuangan berdasarkan SAP dan persyaratan pelaporan keuangan secara detail dan transparan kepada masyarakat selaku principal.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikhosi (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ingin menang sendiri (mementingkan diri sendiri), tetapi manajemen tidak boleh menyalahi bawahannya. Oleh karena itu, manajemen puncak yang berkompeten harus turun tangan secara langsung agar bisa melihat secara langsung bagaimana menciptakan teknik yang baik dan bagaimana meningkatkan loyalitas para eksekutif dibawah SKPD tersebut.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*, ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana memonitor pegawai sehingga dapat diketahui keunggulan ataupun kelemahan pegawainya, yang akhirnya akan menjadi masukan bagi program pengembangan bagi pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian kualitas pekerja, tujuan perusahaan atau instansi dari waktu ke-waktu dapat tercapai (Wibowo 2010 : 7).

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2012: 6) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Sedangkan kinerja karyawan adalah kemampuan karyawan dalam melakukan keahlian tertentu. Kinerja karyawan sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja yang berarti pelaksanaan kerja merupakan suatu proses untuk pencapaian suatu hasil, kinerja juga mengandung arti tata kerja.

Menurut pendapat Achmad (2010: 131), kinerja adalah cara seseorang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai produktivitas dan prestasi kerja. Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari

kinerja pegawainya. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi organisasi.

Menurut Wibowo (2010: 25) bahwa:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi”.

Sedangkan Mangkunegara (2010: 12) menyatakan bahwa:

“Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kedisiplinan.

Menurut Malayu S.P.Hasibuan (2011:193) Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan merupakan peran terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat mencapainya tanpa disiplin sulit bagi karyawan dan organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Kemudian faktor lainnya yang juga mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Motivasi sebagai suatu bentuk dorongan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Terkait dengan motivasi individu dalam suatu organisasi, motivasi dapat dikaitkan dengan suatu dorongan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut Heller (dalam buku Wibowo 2010: 322) yang menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk bertindak ada pendapat bahwa motivasi harus di injeksi dari luar tetapi sekarang semakin dipahami bahwa setiap orang termotivasi oleh beberapa kekuatan yang berbeda di pekerjaan kita perlu memengaruhi bawahan untuk menyalurkan motivasinya dengan kebutuhan organisasi. Menurut Wibowo (2010: 324) ada enam membangun motivasi salah satunya adalah menilai sikap. Menilai sikap merupakan penting bagi manajer untuk memahami sikap mereka terhadap bawahannya. Pikiran mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan akan membentuk cara bagaimana berperilaku terhadap semua orang yang dijumpai. Kekuatan yang mendorong manajer secara kuat memengaruhi perilaku motivasional, karena itu penting untuk memahami asumsi dan prioritas, memberi perhatian terutama pada ambisi pribadi dan organisasi, sehingga dapat memotivasi orang lain dengan efektif.

2.1.3.2 Tujuan Kinerja

Menurut Rivai dan Basri (2015: 78), Tujuan dari sebuah hasil kinerja adalah :

1. Kemahiran dari kemampuan tugas baru diperuntukan.
2. Untuk perbaikan hasil kinerja dan kegiatannya.
3. Kemahiran dari pengetahuan baru dimana akan membantu karyawan dengan pemecahan masalah yang kompleks atas aktivitas membuat keputusan pada tugas.
4. Kemahiran atau perbaikan pada sikap terhadap teman kerjanya dengan satu aktivitas kinerja.

5. Target aktivitas perbaikan kinerja.
6. Perbaikan dalam kualitas atau produksi.
7. Perbaikan dalam waktu atau pengiriman

2.1.3.3 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. (LAN dan BPKP 2000)

Berdasarkan Instruksi presiden No 7 tahun 1999 memberikan pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Menurut instruksi Presiden No 7 tahun 1999, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategi
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara Berkesinambungan.

2.1.3.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mahmudi, (2012:9). Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Sedangkan menurut Mardiasmo, (2012:21). Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas public mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas tersebut, maka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas

yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Karenanya, birokrasi public dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (Husein, 2004:45).

Pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sering ditemui masalah. Karena itu perlu dilakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait yang berperan aktif dalam menciptakan evaluasi manajemen kinerja agar sasaran akuntabilitas pembangunan dapat dicapai dengan baik.

Pemerintah daerah melaporkan akuntabilitas kerjanya lewat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) dan LPPD (Laporan Pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah). LAKIP berpedoman pada Rensta, dan isi LAKIP memuat kinerja dari pemerintah daerah yang melaksanakan Rencana Kerjanya selama setahun atau dalam kurun waktu lima tahun. Kebijakan LAKIP diatur lewat Inpres No 7/1999 yang didukung oleh Undang-Undang No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN. Disamping itu

LAKIP dan LPPD merupakan instrument penilaian kinerja sesuai dengan PP No 8/2006 tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Kegiatan Pemerintah.

2.1.3.5 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Miftah Thoha menjelaskan bahwa salah satu wujud dari akuntabilitas adalah agar semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus di upayakan didasarkan atas undang-undang. Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan produk hukum yang berupa undang-undang ini rakyat mempunyai akses untuk mengatur dan mengendalikannya. Menurut Jeff & Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu : Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, timbulnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat Pendukung Indikator :

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
2. Mekanisme pertanggungjawaban;
3. Laporan tahunan;
4. Laporan pertanggungjawaban;
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
6. Sistem pengawasan;
7. Mekanisme reward and punishment.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi, serta kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat di akses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-

informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan - keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur transparansi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Perangkat Pendukung :

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;

2. Website (e-government , dsb);
3. Iklan layanan masyarakat;
4. Media cetak dan elektronik;
5. Papan pengumuman;

Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi. Informasi yang diberikan oleh aparat pemerintah kecamatan Mamasa mengenai prosedur, waktu dan biaya merupakan bentuk transparansi dalam pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, persyaratan prosedur, waktu, dan biaya harus dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diketahui oleh masyarakat. Informasi pelayanan publik tersebut disalurkan melalui media cetak, Surat Panggilan, papan pengumuman, dan aparat pemerintah setempat. Adanya beberapa saluran informasi, maka masyarakat dengan mudah memperoleh informasi dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Mamasa untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Aparat kecamatan juga selalu siap memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan. Informasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Mamasa khususnya dalam pelayanan publik yang desalurkan melalui media Cetak, papan pengumuman serta melalui aparat pemerintah setempat, merupakan bentuk transparansi. Sejauh ini pemerintah kecamatan Mamasa telah melakukan penyebaran informasi yang jelas dan tepat terkait penyelenggaraan pemerintahan

dalam hal ini pelayanan publik. Pada dasarnya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik harus di dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya good governance sehingga masyarakat mampu merasakan pelayanan kinerja yang baik oleh pemerintah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya beserta hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian akan disajikan antara lain

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Inta Budi Setya (2022)	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.
2	Nelly Agustin (2012)	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik di provinsi Riau.
3	Bryan Sanjaya (2020)	Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja di SKPD Kabupaten Madiun	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Madiun, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Madiun. Ketika di uji secara simultan

			menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan , Kejelasan Sasaran Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di SKPD Kabupaten Madiun.
4	Lystiowati (2022)	Pengaruh Sitem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5	Nur Faizi Sarmin (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup SPKD Kabupaten Majene	Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian regresi berganda yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Perencanaan Anggaran berbanding lurus dengan Akuntabilitas Kinerja, semakin tinggi Perencanaan Anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Majene (SKPD Kab. Majene) maka akan disertai dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada daerah tersebut. Dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sistem Pelaporan berbanding lurus dengan Akuntabilitas Kinerja, semakin tinggi Sistem Pelaporan yang dilakukan pada organisasi pemerintah daerah kabupaten Majene dalam hal ini SKPD di Kabupaten Majene, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi pada daerah tersebut.
6	Oktavima Wisdaningrum (2022)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Perencanaan

		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi.
--	--	---	--

Sumber: Peneliti, data diolah 2024

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka merupakan sebuah konsep yang mana menjelaskan hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Untuk menyelesaikan penelitian ini kerangka konseptual sangatlah diperlukan untuk mengetahui hubungan atau kaitan antara variabel satu terhadap variabel lainnya dari masalah yang ingin diteliti :

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali.

Menurut Munandar (2015:10) mendefinisikan anggaran (*budget*) sebagai “Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”. Berdasarkan definisi di atas,

dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran secara umum merupakan suatu bentuk rencana aktivitas atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu (periode) mendatang yang secara umum dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Haslinda (2016) yang membuat kesimpulan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. berjudul pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi yang

2.3.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Hidayattullah (2013) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif dan transparan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan M. Ali Zakiyudin (2015) yang berjudul pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang membuat kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, sistem

pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

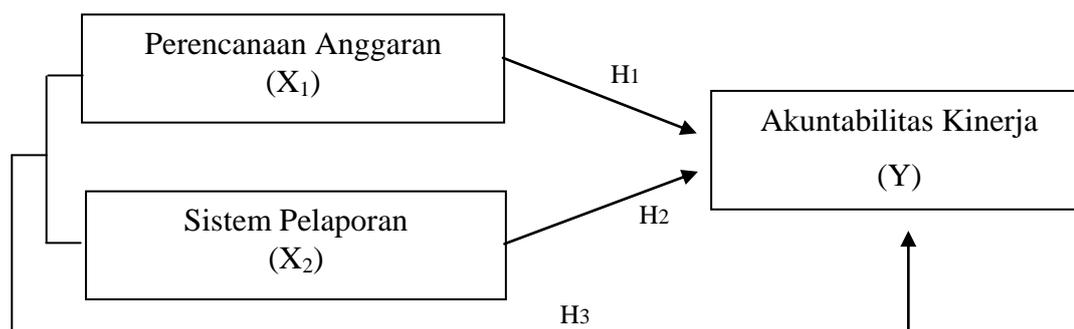
Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.

Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Jasmiati, 2018). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Gayatri, dkk., 2016).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nur Faizi Sarmin (2019) yang berjudul pengaruh perencanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Majene (SKPD Kab.

Majene) yang membuat kesimpulan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Perencanaan Anggaran berbanding lurus dengan Akuntabilitas Kinerja, semakin tinggi Perencanaan Anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Majene (SKPD Kab. Majene) maka akan disertai dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada daerah tersebut. Dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sistem Pelaporan berbanding lurus dengan Akuntabilitas Kinerja, semakin tinggi Sistem Pelaporan yang dilakukan pada organisasi pemerintah daerah kabupaten Majene dalam hal ini SKPD di Kabupaten Majene, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi pada daerah tersebut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Syahrudin dan Silam (2011:98) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁ : Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Camat Medan Belawan.

H₂ : Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.

H₃ : Perencanaan dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawan.